

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada 8 Maret 2019, Bupati Dharmasraya Sutan Riska mengesahkan kompleks percandian di kawasan Pulau Sawah Sebagai Struktur Cagar Budaya peringkat kabupaten.<sup>1</sup> Tindakan tersebut merupakan bentuk apresiasi Pemda Dharmasraya terhadap nilai histori pada konfigurasi bata merah yang terselip di antara kebun getah dan ilalang Siguntur. Rasa memiliki terhadap pusaka lampau itu adalah komitmen menjalankan amanah pemerintah nomor 38 yang terbit tahun 2007 untuk melestarikan kebudayaan di daerah otonom.<sup>2</sup>

Reputasi Kompleks Situs Candi Pulau Sawah<sup>3</sup> sebagai tinggalan sejarah tidak terlalu terkemuka dibanding candi-candi<sup>4</sup> lain di tanah air seperti Candi Kalasan (berangka 778 M), Candi Mendut (sekitar abad VIII M), Candi Borobudur (sekitar abad VIII M oleh raja Samarattungga) dan Candi Singosari (tempat pendharmaan Raja Singosari terakhir Kertanegara) yang memerintah tahun 1268 -1292 M).<sup>5</sup> Di

---

<sup>1</sup> SK Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/KPTS-/BUD/2019, hlm. 1-3.

<sup>2</sup> Sutan Riska, "Implementasi Kebijakan Pelestarian Kebudayaan Daerah Kabupaten Dharmasraya" (tesis), (Padang : Magister Administrasi Publik Universitas Andalas, 2023), hlm. 6-7.

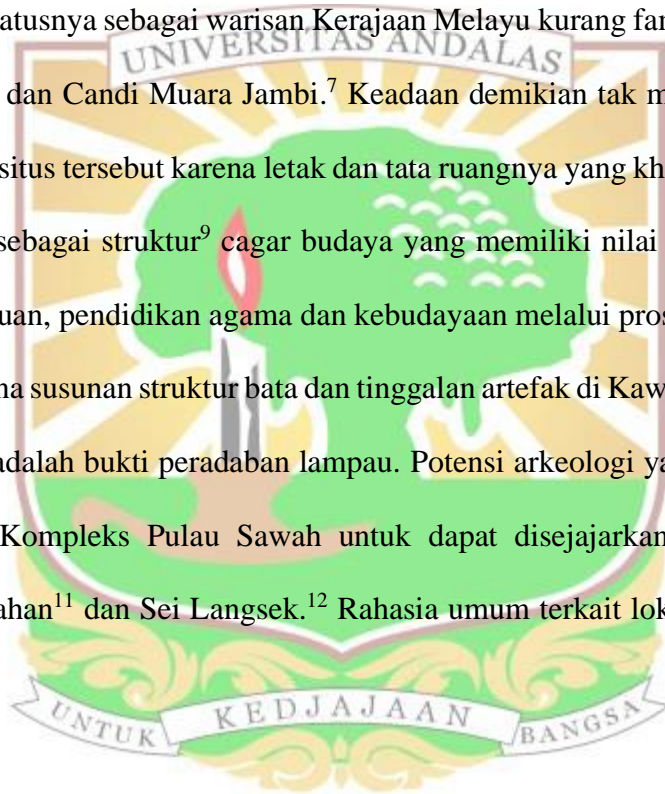
<sup>3</sup> Selain Padang Roco, Pulau Sawah merupakan salah satu kompleks terbesar di Sumatera Barat, Budi Istiawan, "New finds of the classical period in West Sumatra". *In Connecting empires and states: Selected papers from the 13th International Conference of the European Association of Southeast Asian Archaeologists*, 2012, hlm. 45.

<sup>4</sup> Bangunan suci tempat pemujaan dewa dan dianggap replika Gunung Mahameru di India yang melambangkan alam semesta. Ajaran Hindu-Budha, menganggap Gunung Mahameru adalah gunung kosmos yang terletak di tengah kosmos sebagai poros dunia, Rita Isnari, "*Ragam Hias Candi-Candi Di Jawa Motif dan Maknanya*", (Yogyakarta : Kepel Press, 2015), hlm. 1.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 15, 41, 36 dan 81.

samping itu, statusnya sebagai warisan Kerajaan Melayu kurang familiar dari Candi Muara Takus<sup>6</sup> dan Candi Muara Jambi.<sup>7</sup> Keadaan demikian tak mampu menutupi keistimewaan situs tersebut karena letak dan tata ruangnya yang khas<sup>8</sup> meneguhkan situs tersebut sebagai struktur<sup>9</sup> cagar budaya yang memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan agama dan kebudayaan melalui proses penetapan.<sup>10</sup>

Fenomena susunan struktur bata dan tinggalan artefak di Kawasan Percandian Pulau Sawah adalah bukti peradaban lampau. Potensi arkeologi yang tidak sedikit menonjolkan Kompleks Pulau Sawah untuk dapat disejajarkan kedudukannya dengan Rambahan<sup>11</sup> dan Sei Langsek.<sup>12</sup> Rahasia umum terkait lokasi lapik<sup>13</sup> Arca



---

<sup>6</sup> Candi yang tak jauh dari Sungai Batang Kampar ini merupakan warisan Kerajaan Sriwijaya yang ditaksir menjadi pusat peribadatan agama Buddha yang sering dikunjungi Bhairawa dari Mahal (India). Situs Buddha ini pendiriannya sekitar abad ke11 atau 12. Schnitger, *"Forgotten Kingdoms in Sumatra"*, (Leiden : Ej. Brill, 1939), hlm. 19 dan 35.

<sup>7</sup> Situs ini diperkirakan sudah ada sebelum masuknya pengaruh Singasari. Hal itu karena pada tahun 1011-1023 M terdapat seorang guru bernama Atisa dari India belajar di Malayagiri dan kunjungan ke Muara Jambi. Candi Muara Jambi terletak ± 40 km dari kota Jambi atau 30 km dari Kabupaten Muara Jambi. Di percandian Muara Jambi terdapat 82 peninggalan purbakala dan yang baru direkonstruksi sebanyak 8 bangunan, Kristantina Indriastuti, *"Manajemen Sumber Daya Arkeologi Situs Muara Jambi, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi"*, (Palembang : Balai Arkeologi Palembang, 2009), hlm. 24.

<sup>8</sup> Salinan UU Cagar Budaya 11/2010 Pasal 1 (Ayat 6).

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 1 (Ayat 4).

<sup>10</sup> *Ibid*, Pasal 1 (Ayat 1).

<sup>11</sup> Tempat di temukan Arca Amoghapasa. Lokasi ini memiliki Situs Rambahan yang berada di perbukitan dipenuhi gundukan tanah (munggu) di dalam lahan karet dan tanaman perkebunan. Pada situs ditemukan semacam tanggul yang mengelilingi Candi Rambahan, Budi Istiawan, *"Selintas Prasasti dari Melayu Kuno"*, (Batusangkar : BPK Wilayah III, 2023), hlm. 43; Budi Istiawan dan Bambang Budi Utomo, *"Mengungkap Tabir Dharmasraya"*, (Batusangkar: BPCB, 2014), hlm. 23-25.

<sup>12</sup> Budi Istiawan dan Bambang Budi Utomo, 2014, *ibid*, hlm. 27.

<sup>13</sup> Lapik Arca Amoghapasa ditemukan tahun 1991 di Padang Roco, Sei Langsek, Yusfa Hendra Bahar dan Dodi Candra, *Laporan Ekskavasi Penyelamatan Situs Candi Pulau Sawah "Pengumpulan Data Teknis Dalam Rangka Penyelamatan Struktur Bata di Munggu XI"*, (Batusangkar: BPCB, 2019), hlm. 14.

Amoghapasa<sup>14</sup> di Sei Langsek<sup>15</sup> memang memiliki pamor sebagai lokasi Dharmasraya<sup>16</sup>, namun keberadaan konstruksi candi-candi di Pulau Sawah tidak bisa dikesampingkan. Anggapan itu semakin tak terbantah karena terdapat manuskrip<sup>17</sup> yang isinya mengungkapkan lokasi Pemerintahan Dharmasraya berdekatan dengan Desa Sungai Langsung di pesisir Batang Hari di daerah Pulau Punjung, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, Sumatera Barat. Dalam hal ini Pulau Sawah berkesempatan besar mengisi ruang tersebut sehingga diperlukan penelitian komprehensif.

Berpedoman pada beberapa fakta, maka area Candi Pulau Sawah dapat ditafsirkan sebagai santer Kerajaan Melayu Dharmasraya yang disinyalir sebagai pusat administrasi strategis di akhir abad XIII.<sup>18</sup> Nyatanya Penguasa Kerinci mengakui kekuasaan Kerajaan Dharmasraya.<sup>19</sup> Kurun waktu itu relasi Jawa-

---

<sup>14</sup> Kondisi patung setinggi 1,63 meter ini sekarang dalam keadaan muka rusak dan kedua tangan yang hilang, Bambang Budi Utomo dan Sudarman, "Tinggalan Budaya Masa Pengaruh India Dan Penulisan Sejarah Kebudayaan Minangkabau", "Majalah Ilmiah Tabuah : Talimat, Budaya, Humaniora" Vol. 22, No. 2, 2018, hlm. 82.

<sup>15</sup> Tafsiran ini berakar dari peristiwa pengiriman Arca Amoghapasa untuk didirikan di Dharmasraya, namun menjadi rumit karena di kemudian hari arcanya ditemukan di Rambahan sekitar tahun 1800-an dan lapiknya di Sei Langsek. Diperkirakan lokasi Dharmasraya adalah Rambahan jika kedudukan arca masih aslinya (*in situ*). Akan tetapi kalau yang berpindah arcanya dan lapik berada pada posisi semula, maka Sei Langsek adalah Dharmasraya dulu. Dalam hal ini kedua lokasi berkemungkinan sebagai kota Dharmasraya, Budi Istiawan dan Bambang Budi Utomo, 2014, *op.cit.*, hlm. 19; Bambang Budi Utomo, "Pengaruh Kebudayaan India dalam Bentuk Arca di Sumatra", (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 62.

<sup>16</sup> Kata yang tercantum dalam lapik Arca Amoghapasa yang dikenal sebagai Prasasti Dharmasraya, Budi Istiawan, 2023, *op.cit.*, hlm. 45.

<sup>17</sup> Naskah Tanjung Tanah yang berwujud 17 lembar kertas kulit pohon yang dijahit, Uli Kozok, "Manuskrip Melayu Abad Ke-14 Dari Kerinci", *Jurnal Terjemahan Alam & Tamadun Melayu*, Vol. 3, No. 2, 2012, hlm. 89.

<sup>18</sup> Dodi Candra dan Aulia Rahman, "Jalan Panjang Penelusuran Jejak Purbakala di DAS Batanghari Situs Candi Pulau Sawah", (Batusangkar : BPK Wilayah III, 2023), hlm. 17

<sup>19</sup> Eka Asih Putrina Taim, "Peradaban Hindu-Buddha Di Candi Pulau Sawah, Dharmasraya" (cetakan ke-1), (Jakarta : Puslit Arkenas, 2021), hlm. 2.

Sumatera tenar dengan perihal *Pamalayu*, yakni pemberian *Arca Amoghapasa*<sup>20</sup> (1208 S/1286<sup>21</sup> M) dari Raja Kertanegara<sup>22</sup> (Singasari) kepada Sri Maharaja Srimat Tribhuwanaraja Mauliwarmmadewa (Dharmasraya).<sup>23</sup> Kemunculan Dinasti Wangsa Mauli Dharmasraya ini membuka tabir Kerajaan Melayu Dharmasraya bukanlah kelanjutan Sriwijaya.<sup>24</sup> Pendapat itu dibuktikan pula oleh pertanggalan pecahan keramik yang ditemukan di Kompleks Percandian Pulau Sawah yang sezaman dengan masa klasik Indonesia yang menunjukkan bahwa situs tersebut berada di masa Kerajaan Melayu dan Sriwijaya.<sup>25</sup>

Bersamaan dengan Situs Padanglawas, Rambahan, Bukik Awang Maombiak dan Padangroco, maka Kompleks Situs Candi Pulau Sawah di Kabupaten Dharmasraya merupakan kesatuan wilayah Kerajaan Melayu<sup>26</sup> Kuno yang tak luput dari impresi Buddha. Hal itu terungkap dari Prasasti Amoghapasa yang memberi petunjuk bahwa Raja Melayu bernama Adityawarman<sup>27</sup> menganut Buddha aliran

---

<sup>20</sup> Pemberian arca ini merupakan bentuk hadiah, Uli Kozok, 2012, *loc.cit.*

<sup>21</sup> Pada tahun tersebut, Kertanegara mendedikasikan Amoghapasa dalam bentuk batu di Sumatera, Hulu Sungai Batanghari, Aurousseau, Léonard, and Henri Parmentier. "NJ Krom: Inleiding tot de Hindoe-javaansche Kunst." *Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient* Vol. 22, No. 1, 1922, hlm. 264.

<sup>22</sup> Slamet Muljana, "*Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam Nusantara*", (Yogyakarta :LKiS, 2005), hlm. 5;

<sup>23</sup> Budi Istiawan, 2023, *op.cit.*, hlm. 46.

<sup>24</sup> Amri Marzali, "Sejarah Awal Kerajaan Melayu Di Jambi : The Early History Of The Malay Kingdom In Jambi", *Jurnal Pengajian Melayu (JOMAS)*, Vol. 34, No. 2, 2023, hlm. 66-67.

<sup>25</sup> Bambang Budi Utomo, 2016, *op.cit.*, hlm. 55.

<sup>26</sup> Kerajaan ini diperkirakan di dekat Kota Jambi dan mungkin di tempat-tempat lain di kawasan Sumatera, Rusli Amran, "*Sumatra Barat Hingga Plakat Panjang*," (Jakarta: Sinar Harapan, 1981), hlm. 27,

<sup>27</sup> Raja ini dilambangkan dengan sosok Patung Bhairawa raksasa yang ditemukan di tepi Utara Sungai Batanghari, Kecamatan Tanah Datar, Karesidenan Pantai Barat Sumatera. Patung dari pertengahan abad ke-14 itu menggambarkan Adityawarman di puncak kekuasaan. Masa mudanya dihabiskan di Majapahit dan suatu ketika ia bertemu Bhairawa (orang mengerikan dari sekte mistik Buddha) yang sebenarnya telah menyebar ke Sumatra sejak abad ke-11. Di masa Adityawarman aliran tersebut kembali mendapat



Tantra.<sup>28</sup> Aliran tersebut memiliki karakter arca, relief dan hiasan bangunan yang menggambarkan wajah raksasa dengan taring yang menyeringai sehingga Adityawarman memvisualkan sosoknya menyerupai Arca Bhairawa<sup>29</sup> (Buddha demonis/raksasa) setinggi 4,4 m yang sekarang dipelihara Museum Nasional Jakarta.<sup>30</sup>

Corak Buddha yang tergambar pada Kompleks Situs Candi Pulau Sawah beserta tinggalan artefaktualnya bisa juga dihubungkan dengan ekspansi Sriwijaya yang hendak menguasai Melayu sebagai bandar niaga di Malaka.<sup>31</sup> Dampaknya terjadi perpindahan pusat pemerintahan dari Tebo ke Dharmasraya dan berpindah lagi ke Pagaruyung dengan alasan keamanan.<sup>32</sup> Besar kemungkinan perburuan kekuasaan itu disertai dengan penyebaran religi. Faktor lain yang mengindikasikan masuknya Buddha di Kerajaan Melayu diperkuat dengan pesan pada Prasasti Karang Brahi terkait utusan Melayu yang mengunjungi Cina sekitar 852-871 M. Informasinya terdapat pula seorang pendeta Cina bernama I-Tsing mempelajari Buddha di Cina dan India kemudian singgah di wilayah kekuasaan Melayu.<sup>33</sup>

---

kebangkitan dengan mencari kebahagiaan tertinggi dalam kesatuan mistik dengan para dewa, Schnitger, 1939, *op.cit.*, hlm. 30.

<sup>28</sup> Berkembang di Sumatera di masa akhir Sriwijaya. Tinggalannya banyak ditemukan di Sumatera Tengah (Hulu Sungai Batanghari) hingga Sumatera Utara daerah aliran Sungai Barumun. Bambang Budi Utomo, 2016, *op.cit.*, hlm. 37.

<sup>29</sup> Pada Oktober 1935, Schnitger yang sedang menggali undakan bangunan di Sei Langsek menemukan patung raksasa yang memberitahu bahwa bangunan di lokasi pernah diperbaiki Adityawarman tahun 1347. Di tahun 1935 patung jelmaan Adityawarman yang turun dari surga sebagai penyemangat ini dipindahkan ke Bukittinggi dan di tahun 1937 dibawa ke Museum Nasional (dikerahkan 300 kuli dalam pemindahan patung tersebut), Schnitger, 1939, *op.cit.*, hlm. 31; Yusfa Hendra Bahar dan Dodi Candra, 2019, *op.cit.*, hlm. 15; Bambang Budi Utomo, 2016, *op.cit.*, hlm. 172.

<sup>30</sup> Budi Istiawan dan Bambang Budi Utomo, 2014, *op.cit.*, hlm. 22

<sup>31</sup> Bambang Budi Utomo, 2014, *op.cit.*, hlm. 57.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

<sup>33</sup> Amri Marzali, 2023, *loc.cit.*

Sosok lain yang memiliki andil menyiarkan Buddha ke Dharmasraya adalah sosok Kertanegara yang menganut Tantrayana.<sup>34</sup> Persahabatan Raja Singasari itu dengan Tribuana Mauliwarmadewa telah membuka peluang tersiarnya Agama Buddha<sup>35</sup> di Bumi Melayu.<sup>36</sup> Selain untuk menghindari aneksasi Kaisar Shih-tsu Kubilai Khan<sup>37</sup>, pengiriman patung monumental ke Dharmasraya diperkirakan mengkooptasi Kerajaan Melayu agar menerima Singasari secara politik maupun religi. Hal itu karena Hindu-Buddha yang diserap Melayu dari Singasari merupakan tatanan super yang ideal dalam menghadapi benturan peradaban.<sup>38</sup>

Rangkaian informasi yang disebutkan tadi menguak fakta bahwa Kerajaan Melayu Dharmasraya<sup>39</sup> tidak hanya bercorak Buddha, tapi juga dipengaruhi Hindu. Secara periodisasi negara utama<sup>40</sup> Sumatera itu awal pengaruhnya berada di sekitar

---

<sup>34</sup> Aliran ini awalnya berkembang di Benggala (di akhir pemerintahan Dinasti Pala), kemudian menyebar ke Tibet dan Nepal. Di Jawa aliran ini bercampur dengan pemujaan Sywa Bhairawa, Lalu Mulyadi, dkk, “*Relief dan Arca Candi Singosari-Jawi*”, (Malang: Dream Litera Buana, 2015), hlm. 13.

<sup>35</sup> Dibanding Hindu, Agama Buddha lebih dominan di Sumatera, Mestika Zed, “Dharmasraya Di Antara Kerajaan-Kerajaan Melayu Kuno Di Sumatera”, 2009, hlm. 6.

<sup>36</sup> Realitas ini membuktikan bahwa zaman Hindu-Buddha memiliki sejarah panjang di Minangkabau, Sumatera Barat, dikemukakan pada artikel yang berjudul “Dharmasraya Simpan Bukti Peradaban Abad Ke VII” dalam website <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsumbang/dharmasraya-simpan-bukti-peradaban-abad-ke-viii/> yang diakses pada Rabu, 17 Juli 2024 pukul 23.25 WIB..

<sup>37</sup> Kaisar Mongol di Daratan Tiongkok yang sekitar abad ke-13 meluaskan ekspansi untuk menguasai Asia Tenggara, termasuk Nusantara, Bambang Budi Utomo, 2016, *op.cit.*, hlm. 220.

<sup>38</sup> Raja Singasari berusaha menyatukan Hindu-Buddha dalam satu atap yang Diurus pemerintah sehingga tak heran jika sosok patung yang dikirim ke Dharmasraya memiliki misi tersebut, Sinclair, I, “Vajramahākāla and the śaivasauḡata Rulers of Dharmāsraya and Siḡhasāri. *Entangled Religions*, Vol. 13, No. 7, hlm. 27.

<sup>39</sup> Melayu Dharmasraya adalah kelanjutan dari Melayu Jambi. Sebelum pusat pemerintahan berpindah ke Padangroco (Dharmasraya), maka lokasinya ada di Tebo. Melayu Jambi adalah masa Kuno yang ditetapkan berada di Fase I (sekitar abad ke 7 M). Sedangkan Melayu Dharmasraya berada di Fase III (abad 11-14 M), Amri Marzali, 2023, *op.cit.*, hlm. 76; Bambang Budi Utomo, 2016, *op.cit.*, hlm. 55.

<sup>40</sup> Maksudnya Kerajaan Melayu itu “penting” karena menguasai bandar-bandar niaga di sekitar Selat Malaka, Bambang Budi Utomo, 2016, *op.cit.*, hlm. 57 dan 60.

Jambi dan kontras dengan nuansa Hindu yang masuk dari proses Indianisasi dari sebuah bukit bernama *malai*<sup>41</sup> (bahasa Sanskrit) di wilayah Sarolangon Bangko. Pembeberan fakta itu sepertinya berdampak pada wujud temuan di Kompleks Situs Candi Pulau Sawah. Meski didominasi sejumlah tinggalan Buddha, Pulau Sawah juga memiliki warisan bercorak Hindu. Fakta itu menunjukkan bahwa kehidupan Sumatera mengalami sinkretisme antara Hindu-Buddha, meski pun sebenarnya Buddha lebih mendominasi di pulau tersebut.<sup>42</sup>

Esensi Buddha lainnya yang bisa diamati dari perwujudan Kompleks Situs Candi Pulau Sawah di Kabupaten Dharmasraya adalah bentuk yang menyerupai wihara<sup>43</sup> dan terdapat struktur seperti asrama para biksu.<sup>44</sup> Bangunan candi di Pulau Sawah tidak tersusun secara terpusat layaknya candi Hindu yang memiliki konsep keberadaan satu bangunan candi menjadi pusat. Keberadaan candi-candi di Pulau Sawah tidak teratur layaknya candi-candi di Sumatera karena konsepnya dibangun sesuai kebutuhan dan dapat dibuat dimana saja menyesuaikan ketersediaan bahan di sekitar.<sup>45</sup>

---

<sup>41</sup> Sesuai dengan Piagam Tanjore yang dikeluarkan Rajacolamandala 1035 tentang Kerajaan Melayu yang bentengnya di sebuah bukit dan tidak berada di sebuah teluk Muara Jambi, namun merupakan daerah perbukitan dan pedalaman Sungai Batanghari, Amri Marzali, 2023, *op.cit.*, hlm. 74.

<sup>42</sup> Zed, 2009, *loc.cit.*

<sup>43</sup> Rapelita Wahyu Oetomo, "Teknik Pembangunan Candi-Candi Di Sumatera Barat" dalam artikel "*Sumatera Barat Catatan Sejarah dan Arkeologi*", (Sumatera Utara : Balar Medan, 2016), hlm. 99-100.

<sup>44</sup> Seperti di Candi II dan Munggu XI terdapat denah menyerupai istana, *Wawancara* dengan Tumini, 11 Juli 2024 di Batusangkar.

<sup>45</sup> Misalnya batu koral dan pasir isian tengah candi terdapat di sekitar Pulau Sawah yang merupakan daerah sekitar Sungai Batanghari, *ibid.*, hlm. 99.

Sebagai produk peradaban yang mewasiatkan pengetahuan, konstruksi bangunan candi dan peninggalan<sup>46</sup> yang ditemukan di kawasan Pulau Sawah<sup>47</sup> membeberkan alam pikir (imajinasi) anak negeri.<sup>48</sup> Wujud candi-candi dan artefak di lokasi menyuguhkan dimensi estetis (keindahan) dan mengisyaratkan teknik pengerjaan yang maju. Sebagian gaya dan gambar pada tinggalan yang ada memiliki kekhasan sebagai produksi seni religius dari abad ke- 9 M hingga abad ke-10 M.<sup>49</sup> Presensi Kompleks Situs Candi Pulau Sawah mempromosikan alam Siguntur di antara sungai<sup>50</sup> dan vegetasi hutan yang mencirikan area tersebut masuk ke dalam ekosistem Hutan *Dipterocarpacea*.<sup>51</sup>

Kompleks Situs Candi Pulau Sawah sebagai warisan memiliki keunikan karena mencerminkan kearifan lokal dari identitas Kabupaten Dharmasraya sehingga Pulau Sawah harus dilestarikan agar fakta sejarah dan budayanya dapat senantiasa mewakili visi “ menuju Dharmasraya yang mandiri dan berbudaya”.<sup>52</sup>

---

<sup>46</sup> Peninggalan Purba di Sumatera Tengah menampakkan perkembangan Agama Buddha Mahayana, terutama aliran Tantrayana. Fenomena itu sepertinya memiliki korelasi dengan sejarah yang berakar dari Kerajaan Melayu dan Sriwijaya. Buktinya konkrit pada tinggalan disekitar sungai Batang Hari dan sungai Kampar, Kementerian Penerangan, “*Provinsi Sumatera Tengah*”, hlm. 983.

<sup>47</sup> Situs ini terletak pada *meander* sisi utara Sungai Batanghari, pada bidang tanah yang agak datar dengan luas sekitar 15 hektar, Bambang Budi Utomo dan Sudarman, 2018, *op.cit.*, hlm. 81.

<sup>48</sup> Nopriyasman, “Menghadirkan Tonggak Sejarah : Upaya Pelestarian Situs Candi Pulau Sawah Di Kabupaten Dharmasraya”, 2019, hlm. 6.

<sup>49</sup> Budi Istiawan, 2012, *op.cit.*, hlm, 48.

<sup>50</sup> Situs Candi Pulau Sawah terletak di *meander* Sungai Batanghari, Candra dan Rahman, 2023, *op.cit.*, hlm. 31.

<sup>51</sup> Hutan ini didominasi jenis tumbuhan dari famili *Anacardiaceae*, *Annonaceae*, *Burseraceae*, *Enebenaceae* dan lain sebagainya sehingga memiliki pepohonan tinggi berdaun lebar dan jenis paku-pakuan Vita Mattori, “Perubahan Lingkungan Vegetasi Di Kompleks Situs Candi Padang Roco Dan Situs Candi Pulau Sawah Sumatera Barat Berdasarkan Analisis Palinology”, *Jurnal Amerta*, Vol. 26, No. 1, 2008, hlm. 87.

<sup>52</sup> Visi Misi dalam website <https://dharmasrayakab.go.id/dashboard/profil/visi-misi> yang diakses pada Sabtu, 13 Juli 2024 di pukul 04.00 WIB.



Situs tersebut memiliki potensi besar untuk dijadikan objek wisata edukasi<sup>53</sup> yang mewariskan pengetahuan sejarah, religi, budaya dan mencerminkan Dharmasraya sebagai tanah kerajaan.<sup>54</sup>

Sejumlah fakta yang terurai memunculkan dugaan Pulau Sawah sebagai salah satu panggung<sup>55</sup> sejarah Kerajaan Melayu. Secara signifikansi situs tersebut memiliki kekayaan nilai untuk menafsirkan cara hidup pelaku sejarah dari masa klasik, khususnya dalam dimensi Buddha.<sup>56</sup> Pusaka budaya dari Dharmasraya ini urgen dilestarikan karena komponen-komponen strukturnya yang uzur rentan terhadap faktor alam dan ulah manusia.<sup>57</sup>

Berdasar sejarahnya, pelestarian Kompleks Situs Candi Pulau Sawah di Kabupaten Dharmasraya secara terpadu baru terealisasi sejak awal tahun 1990-an.<sup>58</sup> Pada prosesnya perlindungan Kompleks Situs Candi Pulau Sawah menghadapi ragam tantangan baik keterbatasan SDM, pendanaan, kurangnya pemahaman pelestarian dan terganjalnya aksi pelestarian akibat status kepemilikan lahan yang belum menjadi beralih ke negara.<sup>59</sup> Kondisi tersebut tidak menghalangi terciptanya

---

<sup>53</sup> *Wawancara Tertulis* dengan Marsis Sutopo, 1 April 2024.

<sup>54</sup> *Wawancara* dengan Teguh Hidayat, 14 Maret 2024 di Padang; *Wawancara* dengan Tuan Acik Putri Marhasnida dan M. Zoehdi, 19 April 2024 di Siguntur.

<sup>55</sup> Didalam sejarah panggung yang dimaksud berkaitan dengan faktor geografi, yakni tempat berlangsungnya sejarah atau dunia fisik tempat manusia hidup, Helius Sjamsuddin, “*Metodologi Sejarah*”, (Yogyakarta : Ombak, 2012), hlm. 125.

<sup>56</sup> Perspektif ini sinkron dengan Coedes yang mengemukakan bahwa Malayu satu-satunya negeri di Sumatera yang masih bertahan, meski pun pada pertengahan abad ke 14 Islam masuk ke Sumatera, Busro, “*Agama Buddha di Indonesia: Sejarah, Kemunduran dan Kebangkitan*”, (Bandung : Uin Sunan Gunung Djati, 2017), hlm. 6.

<sup>57</sup> *Wawancara* dengan Teguh Hidayat, 14 Maret 2024 di Padang; *Wawancara* dengan Tuan Acik Putri Marhasnida 19 April 2024 di Siguntur

<sup>58</sup> Seiring dengan keberadaan SPSP Sumbar yang mulai beroperasi melestarikan kepurbakalaan di wilayah kerja Sumbar-Riau, *Wawancara Tertulis* dengan Agus Tri Mulyono pada Rabu, 28 Februari 2024.

<sup>59</sup> *Wawancara* dengan Sri Sugiharta, 19 Desember 2023 di Batusangkar.

relasi yang baik dan kolaborasi secara intens antar *stakeholder*<sup>60</sup>. Dalam hal ini para *stakeholder* lokal di Kabupaten Dharmasraya memiliki andil menjadikan objek tersebut masyhur sebagai *Track Mark* Kabupaten Dharmasraya, namun pengembangan secara fisik masih berproses dan memerlukan kerja sama dan persamaan persepsi yang lebih serius.

Aksioma yang dijabarkan tadi cukup menarik dibahas sehingga perlu dibuktikan dengan mengungkap tiga hal, yakni (1) keistimewaan Kompleks Percandian Pulau Sawah sebagai warisan budaya; (2) kolaborasi antar *stakeholder* lokal dalam pengelolaan Kompleks Percandian Pulau Sawah; (3) peranan *stakeholder* lokal dalam mewujudkan pelestarian Komplek Situs Candi Pulau Sawah. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini penulis merancang penelitian yang berjudul “*Pelestarian Kompleks Situs Candi Pulau Sawah Dan Peran Serta Stakeholder Lokal Di Kabupaten Dharmasraya (1990-2022)*”.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, rumusan masalah yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sejarah dan penemuan Kompleks Situs Candi Pulau Sawah di Kabupaten Dharmasraya?
2. Mengapa Pengelolaan Kompleks Situs Candi Pulau Sawah di Kabupaten Dharmasraya melibatkan peranan *stakeholder* lokal?

---

<sup>60</sup> SPSP Batusangkar (kini BPK III), pemerintah pusat (lintas instansi di lingkungan Kemdikbud dan kementerian lain), pemerintah daerah, masyarakat setempat (Siguntur), pewaris Kerajaan Siguntur dan swasta.

3. Bagaimana kolaborasi yang tercipta antar *stakeholder* lokal untuk mewujudkan kelestarian Kompleks Situs Candi Pulau Sawah ?
4. Bagaimana dampak Pelestarian Kompleks Situs Candi Pulau Sawah ?

### 1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian terdiri dari batasan spasial dan batasan temporal. Batasan spasial penelitian ini adalah Kawasan Kompleks Situs Candi Pulau Sawah di Jorong Siguntur Ranah, Kenagarian Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Meskipun fokus pada Dharmasraya, namun praktik penelusuran sumber juga menjelajah keluar kabupaten tersebut seperti ke Padang maupun Batusangkar bahkan hingga visitasi ke Museum Nasional guna menyempurnakan historiografi yang sesuai dengan kaidah penelitian sejarah. Dalam hal ini penentuan spasial disesuaikan dengan kebutuhan sumber untuk menjawab rumusan yang tertuang dalam penelitian.

Batasan temporal penelitian fokus pada tahun 1990-2022. Penentuan tahun awal mewakili masa Kompleks Situs Candi Pulau Sawah mulai diperhatikan secara sistematis dan berkala. Sedangkan batasan akhir di tahun 2022 adalah masa yang cukup memberi gambaran terealisasinya pelestarian yang berkesinambungan dan sukses menyatukan persepsi *stakeholder* terhadap esensi Kompleks Situs Candi Pulau Sawah sebagai aset budaya Kabupaten Dharmasraya yang menjadi simpul sejarah nasional.

#### 1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, yaitu :

1. Membahas Sejarah dan Penemuan Kompleks Situs Candi Pulau Sawah.
2. Mengkaji peranan *stakeholder* lokal dalam pengelolaan Kompleks Situs Candi Pulau Sawah.
3. Menganalisis kolaborasi yang tercipta antar *stakeholder* untuk mewujudkan kelestarian Kompleks Situs Candi Pulau Sawah.
4. Mengkaji dampak Pelestarian Kompleks Situs Candi Pulau Sawah.

Secara teoretis penelitian ini bermanfaat sebagai rujukan ilmiah untuk mengkaji Kompleks Situs Candi Pulau Sawah sebagai warisan Kerajaan Melayu bernuansa Buddha. Di samping itu, karya ini kompeten memperkaya khazanah penulisan karya sejarah pelestarian cagar budaya. Kemudian berguna sebagai acuan untuk meningkatkan kolaborasi lebih intens antara *stakeholder* lokal yang dimaksud dalam penelitian ini sekaligus menjaga kelestarian Situs Pulau Sawah sebagai aset budaya bangsa dapat terjaga dan terpelihara guna mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan. Selain itu, bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memajukan Kompleks Situs Candi Pulau Sawah sebagai identitas yang mewujudkan kearifan lokal Kabupaten Dharmasraya.



## 1.5 Tinjauan Kepustakaan

Buku yang membahas tentang Pengelolaan Kompleks Situs Candi Pulau Sawah amat minim. Akan tetapi terdapat beberapa buku yang memudahkan penelitian untuk mengungkap keistimewaan Kompleks Percandian Pulau Sawah dan sejarah pelestariannya.

*Pertama*, Buku berjudul *Menguk Tabir Dharmasraya* karya Budi Istiawan dan Bambang Budi Utomo yang diterbitkan BPCB Sumbar pada tahun 2014. Buku ini membahas sejarah asal mula Dharmasraya berikut tinggalan kepurbakalaan yang salah satunya Situs Candi Pulau Sawah. Buku ini bisa dijadikan sebagai rujukan penelitian karena menyajikan informasi terkait kondisi Situs Candi Pulau Sawah beserta tinggalan disekitarnya yang diduga sebagai warisan Kerajaan Melayu Dharmasraya. Pada buku dikemukakan bahwa Pulau Sawah memiliki tinggalan arkeologi lebih banyak dibanding lokasi lain seperti Rambahan maupun Sei Langsek sehingga memungkinkan lokasi ini menjadi ibukota Kerajaan Dharmasraya.<sup>61</sup> Secara sekilas dimunculkan pula aktivitas pelestarian yang melibatkan *stakeholder* terkait.

*Kedua*, Buku berjudul *Peradaban Hindu-Buddha Di Candi Pulau Sawah, Dharmasraya* (cetakan ke-1). Buku karya Eka Asih Putrina Taim ini diterbitkan Puslit Arkenas pada tahun 2021. Sumbangsih buku setebal 42 halaman itu terhadap penelitian, yaitu mengungkap dimensi Buddha pada kepurbakalaan yang terdapat di Pulau Sawah. Apabila isi buku juga membahas tentang tinggalan Hindu, maka penelitian ini lebih fokus pada spektrum Buddha. Inti dari penelitian ini adalah

---

<sup>61</sup> Budi Istiawan dan Bambang Budi Utomo, 2014, *loc.cit.*

mengungkap sejarah pelestarian Kompleks Situs Candi Pulau Sawah sebagai warisan budaya lewat peran *stakeholder* lokal di Kabupaten Dharmasraya. Sedangkan esensi buku lebih kepada penampilan data arkeologis yang disertai penampilan informasi geografis.

*Ketiga, Buku Jalan Panjang Penelusuran Jejak Purbakala di DAS Batanghari Situs Candi Pulau Sawah.* Buku setebal 262 halaman ini diterbitkan tahun 2023. Hasil kolaborasi Dodi Candra dan Aulia Rahman ini komplit akan dimensi sejarah, arkeologi, geografi, geologi dan geomorfologi. Buku membahas sejarah Situs Candi Pulau Sawah sebagai Peradaban Batanghari yang tersimpul dengan Kerajaan Melayu Kuno. Selain itu dikemukakan pula mengenai riwayat pelestarian sejak zaman kolonial hingga era kemerdekaan. Pada karya ini tampak peran pihak-pihak terkait yang mendukung kelestarian Kompleks Candi di Pulau Sawah hingga kini. Buku ini amat membantu penelitian dalam mendekonstruksi sejarah, penemuan dan proses dari pelestarian Kompleks Situs Candi Pulau Sawah dari masa ke masa

*Keempat, Buku Selintas Prasasti Dari Melayu Kuno* yang terbit tahun 2023. Pada buku ini Budi Istiawan memublikasikan tinggalan klasik (Hindu-Buddha) dengan cara menyampaikan pesan yang terdapat pada tulisan dari beberapa prasasti di Tanah Datar dan Dharmasraya. Kontribusi buku ini terhadap penelitian karena ada beberapa prasasti yang berkaitan dengan Kerajaan Melayu Dharmasraya seperti yang ada di Kompleks Prasasti Adityawarman, Prasasti Amoghapasa dan Prasasti Dharmasraya. Secara keseluruhan 19 prasasti yang diduga berasal dari abad ke XIV

M<sup>62</sup> itu membahas tentang Adityawarman sebagai penguasa Pagaruyung. Berdasarkan inskripsi pada prasasti Dharmasraya diperoleh berita mengenai Ekspedisi *Pamalayu*<sup>63</sup> yang menjadi petanda mengenai eksistensi Kerajaan Melayu di Dharmasraya. Sumbangsih analisis buku ini dengan penelitian bisa dilihat dari presensi Situs Candi Pulau Sawah yang ditaksir memiliki sangkut paut dengan Kerajaan Melayu tersebut. Meski pada pengantar buku ini menyoal mengenai tugas SPSP Batusangkar (kini BPK III Sumbar), namun pada pengkajian materi lebih menonjolkan sisi sejarah dan arkeologi tinggalan-tinggalan yang dibahas dan tidak membicarakan mengenai kelembagaan SPSP.

*Kelima*, Buku *Pengaruh Kebudayaan India dalam Bentuk Arca di Sumatera* karya Bambang Budi Utomo yang terbit tahun 2016. Buku yang memiliki 242 halaman ini membahas tinggalan budaya yang mendapat pengaruh India di Sumatera, misalnya dalam bentuk religi Hindu-Buddha yang diwujudkan dalam bentuk bangunan suci seperti candi, prasasti dan arca (batu logam). Relevansi buku ini dengan penelitian karena mengungkap salah satu jejak Kerajaan Melayu yang ada di Hulu Sungai Batanghari. Bambang Budi Utomo lewat perspektifnya mengutarakan bahwa Pulau Sawah merupakan salah satu situs arkeologis di wilayah tersebut yang dapat ditunjuk dengan pertanggalan abad ke 13-14 Masehi. Menurutnya telah terjadi pergeseran permukiman Kerajaan Melayu dari permukiman tua (Hilir Batanghari sekitar abad 8-11 Masehi) ke permukiman muda (Hulu Batanghari di Sumatera Barat). Meskipun buku ini fokus mengupas rinci

---

<sup>62</sup> Budi Istiawan, 2023, *op.cit.* hlm. 1.

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 45-46.

arca-arca di Sumatera berikut gaya dan seninya, namun secara tak langsung menunjang penelitian untuk mendedah Kompleks Situs Candi Pulau Sawah yang dapat dikaitkan dengan periode Kerajaan Melayu Dharmasraya sehingga dapat melihat simpul yang memunculkan peranan *stakeholder* lokal untuk terlibat mendukung pelestarian.

*Keenam*, Buku Sejarah Nasional Indonesia II (cetakan ke-8) yang diterbitkan Balai Pustaka pada tahun 1993. Karya setebal 552 halaman ini disusun Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. Relevansi buku dengan penelitian karena salah satu sub babnya membahas tentang Kerajaan Melayu Dharmasraya yang berafiliasi dengan Kerajaan Singasari yang bernuansa Buddha. Apabila riset pada buku ini berisi materi tentang Kerajaan-Kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara, maka fokus penelitian tesis ini lebih kepada Kerajaan Melayu Dharmasraya yang kiprahnya memiliki keterkaitan dengan konstruksi percandian dan temuan artefaktual di Pulau Sawah.

*Ketujuh*, Buku *Indonesia Dalam Arus Sejarah (Kerajaan Hindu Buddha)* yang editornya adalah Taufik Abdullah dan A.B. Lopian. Kumpulan tulisan dari Agus Ari Munandar dan 10 penulis lainnya ini diterbitkan Ichtiar Baru Van Hoeve dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2012. Kapasitas tulisan berjumlah 372 halaman tersebut terhadap penelitian karena salah satu penulisnya, yakni Machi Suhadi membahas Kerajaan Melayu dan terdapat uraian kronologis tentang Ekspedisi *Pamalayu* di Dharmasraya. Selain itu, sekelumit kajiannya mengenai lokasi Kerajaan Melayu, tentang Hubungan Melayu dan Sriwijaya, Adityawarman Raja Melayu dan Tinggalan Arkeologi Masa Kerajaan Melayu



memudahkan peneliti untuk merekonstruksi sejarah Dharmasraya sebagai tanah kerajaan lewat salah satu tinggalannya yang dikenal Pulau Sawah. Pada buku dijelaskan bahwa Candi Pulau Sawah merupakan salah satu tinggalan Kerajaan Melayu. Berdasarkan laporan SPSP Pulau Sawah memiliki 17 candi dengan pengupasan 3 candi yang menampakkan kaki candi.<sup>64</sup>

*Kedelapan, Buku Sejarah Kerajaan Bawahan Majapahit Di Luar Jawa dan Luar Negeri.* Karya Peri Mardiyono ini berjumlah 284 halaman dan diterbitkan Arasaka di Yogyakarta pada tahun 2023. Relevansi buku ini dengan penelitian karena meneguhkan perspektif terkait Peristiwa *Pamalayu* yang berlangsung di Dharmasraya. Lewat eksplanasinya tentang kekuasaan Majapahit, maka terkuak fakta Kerajaan Melayu Dharmasraya<sup>65</sup> yang berada dalam otoritas Majapahit sah adanya. Secara ekstensif buku ini membahas eksistensi Majapahit dalam melakukan ekspansi. Sedangkan fokus penelitian lebih fokus pada Kerajaan Melayu Dharmasraya dan keterkaitannya dengan Kompleks Situs Candi Pulau Sawah.

*Kesembilan, Buku Sejarah Kebudayaan Indonesia.* Buku ini merupakan bahan ajar karangan Etty Saringendyanti dan Wan Irama Puar yang terbit tahun 2009. Buku sejumlah 242 halaman ini membahas mengenai manusia dan kebudayaan, serta perubahan kebudayaan. Secara totalitas kajian tersebut fokus pada “kebudayaan”. Setelah dicermati buku ini mengungkapkan periodisasi

---

<sup>64</sup> Tulisan Machi Suhadi pada “*Indonesia Dalam Arus Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha*”, (Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2012), hlm. 137.

<sup>65</sup> Berdasarkan Kitab Negarakertagama Pupuh 13 menyebutkan Tanah Melayu, dimana salah satu yang menjadi negara bawahan Majapahit adalah Dharmasraya, Peri Mardiyono, “*Sejarah Kerajaan Bawahan Majapahit Di Luar Jawa dan Luar Negeri*”, (Yogyakarta : Araska Publisher, 2023), hlm. 106.

kebudayaan Indonesia mulai dari Prasejarah, Masa Hindu-Buddha, Periode Islam, Kebudayaan Indis, Era Kemerdekaan. Substansi buku ini terhadap penelitian karena pembahasannya tentang masa Hindu-Buddha cukup kompeten dalam meneropong Kompleks Situs Candi Pulau Sawah sebagaiinggalan Buddha bila ditelusur dari komponen material candi, tata letaknya dan fungsinya sebagai bangunan keagamaan. Sumbangsih lain dari buku ini karena memberi pemahaman bahwa situs keagamaan seperti candi merupakan salah satu bentuk warisan budaya yang harus dilestarikan. Apabila secara periodisasi sejarah Indonesia, isi buku ini memaparkan hasil kebudayaan dari berbagai wilayah di tanah air (tidak terbatas hanya satu pulau), maka penelitian fokus kepada Kompleks Situs Candi Pulau Sawah yang ada di Kabupaten Dharmasraya.

Selain buku, terdapat karya tulis ilmiah berupa tesis dan skripsi yang dirujuk dalam penelitian ini. *Pertama*, Tesis Sutan Riska yang berjudul *Implementasi Kebijakan Pelestarian Kebudayaan Daerah Kabupaten Dharmasraya*. Fokus tesis yang dipublikasikan tahun 2023 ini membahas pelaksanaan kegiatan pelestarian kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya antara tahun 2021-2026 berdasarkan Perda RPJMD Kabupaten Dharmasraya yang dituangkan pada Renstra Dinas Budparpora. Sutan Riska Bupati Dharmasraya dua periode<sup>66</sup> selaku penulis tesis mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pelestarian Kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya. Adapun sumbangan tesis administrasi publik tersebut mengulas implementasi kebijakan yang diselenggarakan, salah satunya terkait dengan pelestarian Situs Candi Pulau Sawah. Pada tesis disebutkan

---

<sup>66</sup> Sutan Riska, 2023, *op.cit.*, hlm. 56.

Bupati Dharmasraya mengeluarkan SK Penetapan situs tersebut sebagai struktur cagar budaya sehingga memberikan keamanan dan perawatan. Dimana Kebijakan berdampak dalam melindungi, merawat, menjaga dan melestarikan Pulau Sawah dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab<sup>67</sup>. Tesis ini juga menyokong penelitian karena menjelaskan pentingnya kolaborasi antar *stakeholder* dengan mengaitkan pada Teori Grindle tentang *content of policy* pada indicator *interest affected* (pihak yang kepentingannya mempengaruhi kebijakan).<sup>68</sup> Apabila penulis tesis mendiskusikan seluruh objek cagar budaya di Kabupaten Dharmasraya, maka penelitian ini membatasi kajian pada Pelestarian Kompleks Situs Candi Pulau Sawah.

Kedua, Tesis Sri Sugiharta berupa tesis yang berjudul *Jalan Terjal Desentralisasi: Dinamika Penyelenggaraan Urusan Kepurbakalaan di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat Pada Era Otonomi Daerah (1999-2011)*. Tesis yang terbit tahun 2013 dengan jumlah halaman 161 lembar ini memberikan refleksi tentang penyelenggaraan keurbakalaan di daerah otonom. Hasil eksplanasinya terhadap pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Tanah Datar menunjukkan peran serta *stakeholder* lokal terkait, serta dinamika pelestarian yang dipengaruhi kebijakan-kebijakan teraktual. Sri Sugiharta menjelaskan tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan dalam penyelenggaraan keurbakalaan sehingga dapat dijadikan acuan untuk menyelusuri tantangan dalam Pelestarian Kompleks Situs Candi Pulau Sawah. Apabila tesis Sri Sugiharta menjadikan Tanah Datar

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 102-103.

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 66.

sebagai ruang kajian dan membahas keseluruhan tinggalan kepurbakalaan di kabupaten itu, maka penelitian ini membatasi ruang lingkup dengan menyoroti Pulau Sawah di Kabupaten Dharmasraya sebagai fokus kajian.

*Ketiga*, Skripsi Ema Nurzayanti yang berjudul *Transformasi Temuan Fragmen Keramik Di Situs Candi Pulau Sawah*. Karya yang terbit tahun 2021 itu membahas proses transformasi temuan fragmen keramik sebagai salah satu proses pembentukan data arkeologi. Apabila skripsi ini adalah kajian arkeologi, maka penelitian fokus pada sejarah pelestarian Pulau Sawah sehingga dapat memahami keistimewaan objek tersebut yang terdaya menyatukan persepsi *stakeholder*.

Tinjauan Pustaka tidak terbatas pada buku, tesis dan skripsi tapi juga terdapat artikel yang dimuat pada beberapa jurnal. *Pertama*, tulisan Amri Marzali yang berjudul “Sejarah Awal Kerajaan Melayu Di Jambi” pada Jurnal Pengajian Melayu (JOMAS)”. Tulisan itu mengkaji asal-usul dan lokasi awal Kerajaan Melayu. Di dalam eksplanasinya Amri Marzali menyebutkan pusat Kerajaan Melayu di Sumatera berpindah-pindah. Disebutkan awalnya terletak di Desa Karang Brahi, Kecamatan Pamenang, Merangin Jambi. lalu berpindah ke Muara Jambi, kemudian kedudukan dikembalikan lagi ke Desa Karang Brahi. Demi menghindari serangan Sriwijaya pusat pemerintahan dipindahkan ke Muara Tebo. Akan tetapi serangan tentara Jawa 1275 menyebabkan ibu kota di pindahkan ke Dharmasraya.<sup>69</sup> Bersumber pada karya itu disimpulkan bahwa Dharmasraya merupakan salah satu ruang yang pernah menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Melayu. Hal ini bisa dikaitkan dengan struktur reruntuhan candi di Pulau Sawah yang berada pada

---

<sup>69</sup> Amri Marzali, 2023, *op.cit.*, hlm. 76-78.



lahan<sup>70</sup> seluas 2 hektar.<sup>71</sup> Kaitan tulisan tersebut dengan penelitian dapat membantu menjawab realitas yang menjadikan Pulau Sawah unik dalam pembahasan sejarah.

*Kedua*, terdapat artikel Mifta Yulanda dan Najmi yang berjudul “Pemugaran Candi Padang Roco dan Candi Pulau Sawah di Kabupaten Dharmasraya (1995-2018)”. Karya yang diterbitkan dalam Jurnal “Galanggang Sejarah” tahun 2023 itu membahas Pemugaran Candi Padang Roco dan Candi Pulau Sawah. Keduanya adalah aset Dharmasraya yang berada di lingkungan DAS Batanghari. Diperkirakan situs-situs tersebut memiliki keterkaitan dengan Kerajaan Melayu Dharmasraya dan diduga hidup sezaman. Pada tulisan itu terungkap bahwa pelaksanaan pemugaran dapat dilaksanakan berkat kerja sama lembaga yang bertanggung jawab mengelola situs Cagar Budaya, yaitu BPCB Batusangkar dan Disbudparpora Dharmasraya.<sup>72</sup> Lewat karya itu diketahui beberapa kendala pelestarian seperti akses, kurangnya SDM dan cuaca tak menentu sehingga disarankan melakukan perencanaan sebelum mengadakan kegiatan.<sup>73</sup> Sumbangsih tulisan ini pada penelitian sebagai koraborasi yang tak menafikan keistimewaan Situs Pulau Sawah sebagai warisan kerajaan. Terkait kelembagaan (dalam hal ini SPSP Batusangkar//BP3/BPCB/ BPK III) bersama *stakeholder* lain bersatu padu dalam mewujudkan kelestarian dan pengembangan Kompleks Situs Candi Pulau Sawah. Pada akhirnya tulisan ini dapat

---

<sup>70</sup> Lahannya tanah adat/ ulayat yang dimiliki dan dikuasai oleh Pewaris Kerajaan Siguntur, Dodi Candra dan Aulia Rahman, 2023, *op.cit.*, hlm. 28.

<sup>71</sup> Eka Asih Putrina Taim “The Oldest Ancient Shrine from Hindu Buddha Period in Upstream Batanghari River West Sumatera”. In *Sixth International Conference on Language, Literature, Culture, and Education (ICOLLITE)*, (pp. 162-177). 2022, hlm. 163.

<sup>72</sup> Mifta Yulanda dan Najmi, “Pemugaran Candi Padang Roco dan Candi Pulau Sawah di Kabupaten Dharmasraya (1995-2018)”, *Galanggang Sejarah*, Vol. 5 , No. 1, 2023, hlm. 15.

<sup>73</sup> *Ibid.*

dijadikan salah satu referensi yang menggambarkan kerja sama antar *stakeholder* lokal di Kabupaten Dharmasraya .

*Ketiga*, tulisan Pepy Afrilian dan Desma Rustika (2022) berjudul “Peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Dharmasraya Dalam Pengembangan Objek Wisata Candi Pulau Sawah”. Tulisan yang dimuat dalam Jurnal “Isi Padang Panjang berjudul” itu membahas peran Disbudparpora Kabupaten Dharmasraya dalam mengembangkan potensi Situs Candi Pulau Sawah sebagai objek wisata. Pep dan Desma menyebutkan Disbudparpora sebagai *fasilitator* yang memfasilitasi urusan pengembangan destinasi wisata. Lembaga tersebut juga merupakan *dinamisator* untuk membangun relasi dengan *stakeholder* terkait.<sup>74</sup> Koordinasi terpadu disertai hubungan baik dengan perangkat daerah Siguntur dan masyarakat adalah bukti bahwa aktor penyelenggara kebudayaan dan pariwisata Dharmasraya ini telah melakukan pengembangan yang cukup efektif. Terkait penelitian, maka dari karya tersebut dapat dipahami bahwa Disbudparpora merupakan salah satu *stakeholder* lokal yang menunjang kolaborasi harmoni antar *stakeholder*.

*Keempat*, tulisan Eka Asih Putrina Taim tentang “Persebaran Arca Buddha Abad Ke-7-9 Masehi: Hubungannya dengan Perkembangan Kawasan Awal Kerajaan Sriwijaya”. Artikel yang terbit pada Jurnal “Naditira Widya” menjelaskan persebaran arca Buddha yang dipengaruhi oleh perkembangan agama tersebut

---

<sup>74</sup> Pepy Afrilian dan Desma Rustika, “Peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Dharmasraya dalam Pengembangan Objek Wisata Candi Pulau Sawah”, *Journal of Tourism Sciences, Technology and Industry*, Vol.1, No. 2, 2022, hlm. 3.

berlangsung sekitar abad 7-9 M seiring dengan meluasnya aktivitas politik dan budaya Kerajaan Sriwijaya.<sup>75</sup> Eka Asih mengungkap temuan bercorak Buddha di Pulau Sawah, umumnya berada dalam timbunan candi Pulau Sawah II. Relevansi karya ini dengan penelitian ialah menyingkap keistimewaan Pulau Sawah sebagai panggung sejarah yang memuat kisah kerajaan dan religi.

*Kelima*, artikel Asyhadi Mufsi Sadzali, Wulan Resiyani, and Yundi Fitrah pada Konferensi Internasional Tentang Identitas Melayu yang berjudul “The Civilization of Batanghari River: The Relationship between Dharmasraya Temple and Muarajambi Ancient Malay Period in Religious Perspective. Karya yang terbit pada Jurnal “The Cross Culture, and Challenge of Sustainability” itu mengkaji hubungan kawasan hulu (Dharmasraya) dan hilir (sekitar Candi Muara Jambi) Sungai Batanghari sebagai pusat peradaban Melayu kuno antara abad VII dan XIV M.<sup>76</sup> Ternyata religi menjadi koneksi antara kedua wilayah itu mengingat agama di hulu adalah *Buddha Tantrayana Mahayana a widya* (sayap kiri) dan di bagian hilir berupa *Buddha Tantrayana Mahayana widya* atau (sayap kanan). Kondisi itu dipengaruhi oleh posisi kawasan yang berada di daerah aliran sungai Batanghari. Asyhadi Mufsi Sadzali, Wulan Resiyani, and Yundi Fitrah menuturkan bahwa DAS Batanghari bagian hulu merupakan pusat politik dan pemerintahan pada masa Melayu Kuno (abad XIII-XIV Masehi).<sup>77</sup> Dari ulasan itu dipahami bahwa

---

<sup>75</sup> Eka Asih Putri Taim, “Persebaran Arca Buddha Abad Ke-7-9 Masehi: Hubungannya dengan Perkembangan Kawasan Awal Kerajaan Sriwijaya”. *Jurnal Naditira Widya*, Vol. 16 , No. 2, 2022, hlm. 95.

<sup>76</sup> Asyhadi Mufsi Sadzali, Wulan Resiyani, and Yundi Fitrah, “The Civilization of Batanghari River: The Relationship between Dharmasraya Temple and Muarajambi Ancient Malay Period in Religious Perspective”, *In Proceeding International Conference on Malay Identity* (Vol. 2, pp. 7-14), 2021, hlm. 7

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm.13-34.

Dharmasraya merupakan bagian dari simpul Kerajaan Melayu. Peranan Sungai Batanghari bagian hulu yang mengelilingi lingkungan Pulau Sawah memberi makna bahwa lokasi situs memiliki keterkaitan dengan aktivitas pemerintahan kerajaan maupun religi yang bernuansa Buddha.

*Keenam*, terdapat tulisan Budi Istiawan yang berjudul “New finds of the classical period in West Sumatra”. Karya yang dipublikasikan lewat *Connecting empires and states: Selected papers from the 13th International Conference of the European Association of Southeast Asian Archaeologists* ini mengkaji tinggalan dari abad 12-14 M di Kabupaten Dharmasraya, Tanah Datar dan Pasaman.<sup>78</sup> Berdasarkan temuan kompleks arsitektur, prasasti dan arca, maka Budi Istiawan berpendapat bahwa wilayah yang disebutkan tadi disinyalir sebagai bagian dari Kerajaan Buddha. Relevansi artikel tersebut dengan penelitian karena mengarahkan pada keterkaitan Kompleks Situs Candi Pulau Sawah dengan eksistensi Kerajaan Melayu Dharmasraya. Perspektif Budi Istiawan yang menaksir keterkaitan Pulau Sawah dengan ritual keagamaan dan memperkirakan adanya fase pemukiman di area situs itu memudahkan peneliti untuk membuktikan bahwa corak Buddha *real* dapat meronai Pulau Sawah di masa silam.

Tinjauan pustaka yang diulas tadi menginformasikan bahwa kajian intensif mengenai pengelolaan kepurbakalaan di Pulau Sawah yang menonjolkan peran serta *stakeholder* lokal belum ada. Literatur yang ada hanya memuat sebagian materi tentang pengelolaan situs atau hanya mendeskripsikan Pulau Sawah sebagai

---

<sup>78</sup> Budi Istiawan, 2012, *op.cit.*, hlm. 43.



tinggalan Buddha atau keterkaitannya sebagai tata ruang pemerintahan Kerajaan Melayu. Berdasarkan realitas itu terciptalah penelitian berjudul “*Pelestarian Kompleks Situs Candi Pulau Sawah Dan Peran Serta Stakeholder Lokal Di Kabupaten Dharmasraya (1990-2022)*” guna menyajikan eksplanasi tentang peran serta stakeholder lokal dalam pengelolaan Kompleks Situs Candi Pulau Sawah. Pemaparan tinjauan pustaka tadi guna menghindari plagiat sehingga penulis mantap menyuarakan bahwa karya ini menjunjung orisinalitas.

## 1.6 Kerangka Konseptual

Penelitian ini fokus terhadap peran serta *stakeholder* lokal di Kabupaten Dharmasraya yang berkolaborasi mengelola Kompleks Situs Candi Pulau Sawah sebagai warisan budaya. Menurut Machmoed Effendhie (2019), warisan budaya menginformasikan bentuk-bentuk tinggalan budaya berupa perangkat-perangkat dan simbol atau lambang yang membawa pesan masa lalu untuk generasi mendatang. Warisan budaya terdiri atas warisan budaya benda (*tangible culture*) dan tak benda (*intangible culture*).<sup>79</sup>

Menurut Mcgimsey dan Davis (1977) warisan budaya berpotensi memiliki nilai penting. Schiffer dan House (1977) menyebut warisan budaya bernilai substantif, antropologis, ilmu sosial dan metodologi-teoretis. Schiffer dan Gumerman (1977) mengemukakan warisan budaya penting dari segi ilmu

---

<sup>79</sup> Yumanraya Noho, Meilinda L. Modjo dan Tazkiya N. Ichsan, “Pengemasan warisan budaya tak benda “Paiya Lohungo Lopoli” sebagai atraksi wisata budaya di Gorontalo”, *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, Vol. 4, No. 2, 2020., hlm. 179.

pengetahuan, sejarah, etnik, estetik dan menunjang kepentingan masyarakat secara umum seperti memberi pendidikan masyarakat dan keuntungan ekonomi.<sup>80</sup>

Pada penelitian ini, Kompleks Situs Candi Pulau Sawah dipahami sebagai *tangible culture* sehingga harus dilestarikan karena memiliki nilai penting<sup>81</sup> yang selaras dengan visi Kabupaten Dharmasraya sebagai “kabupaten mandiri dan berbudaya”.<sup>82</sup> Bersumber dari perspektif tersebut, penelitian ini menggunakan konsep *Cultural Resource Management* dan *Sustainable Heritage Management* sebagai alat analisis untuk memahami kepurbakalaan di Pulau Sawah sebagai kekayaan bangsa yang sejarah, pengetahuan, agama, pendidikan dan kebudayaan sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>83</sup>

Istilah *Cultural Resource Management* berasal dari Amerika Serikat sekitar tahun 1980 an. Di Indonesia pembahasan ini muncul sekitar tahun 1990-an ketika ilmu arkeologi dihadapkan pada persoalan pembangunan yang memerlukan bentuk pengelolaan yang merujuk langsung pada kepentingan pengembangan dan pemanfaatan.<sup>84</sup> Menurut Luranje Smith (2004), CRM mengacu pada proses dan

---

<sup>80</sup> Daud Aris Tanudirdjo, “*Warisan Budaya Untuk Semua Arah Kebijakan Pengelolaan Warisan Indonesia Di Masa Mendatang*”, makalah disampaikan dalam Kongres Kebudayaan V di Bukittinggi 19-23 Oktober 2003, hlm. 4-5; Daud Aris Tanudirdjo, *Penetapan Nilai Penting Dalam Pengelolaan Benda Cagar Budaya*, makalah disampaikan dalam Rapat Penyusunan Standarisasi (Pembobotan) Banguna Benda Cagar Budaya di Rumah Joglo Rempoa di Ciputat Jakarta 26-28 Mei 2004. 2-3.

<sup>81</sup> Pasal 1 dan 4 pada Bab Ketentuan Umum, UU CB 11/2010.

<sup>82</sup> Visi Misi dalam website <https://dharmasrayakab.go.id/dashboard/profil/visi-misi> yang diakses pada Sabtu, 13 Juli 2024 di pukul 04.00 WIB.

<sup>83</sup> UU CB 11/2010, *op.cit.*, Pasal 21 dan 22.

<sup>84</sup> Bambang Sulistyanto, “Manajemen Pengelolaan Warisan Budaya : Evaluasi

prosedur, yang sering kali didukung oleh kebijakan publik dan perundang-undangan yang digunakan untuk melindungi, melestarikan dan/atau mengkonservasi benda-benda warisan budaya, situs-situs, tempat, dan monumen.<sup>85</sup>

Pada prosesnya pengelolaan Kompleks Situs Candi Pulau Sawah sebagai warisan budaya melibatkan kolaborasi *stakeholder* lokal yang diartikan sebagai publik jamak. Beberapa pakar arkeologi seperti Hoder, Layton, Cleere dan Little berpendapat bahwa publik yang jamak tersebut masing-masing merasa memiliki kepentingan dan ingin mengambil manfaat dari warisan budaya. Hal itu karena warisan budaya memiliki nilai penting yang berbeda bagi setiap pihak.<sup>86</sup> Supaya kepentingan dan pelestarian terwujud sesuai keinginan diperlukan peningkatan peran serta *stakeholder* lokal untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya.<sup>87</sup>

Menurut Hung Ming Tu dalam tulisannya “*Sustainable heritage management: Exploring dimensions of pull and push factors*”, Pengelolaan Warisan Budaya Berkelanjutan Penting karena mempertimbangkan kemampuan objek tersebut untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia (2020:1). Bonn, dkk (2007) berpendapat bahwa faktor penarik atau pentingnya cagar budaya ditentukan status warisan, makna budaya, sejarah, suasana, dan tata letak.<sup>88</sup> Segenap potensi

---

Hasil Penelitian Pusat Arkeologi Nasional (2005-2014)”, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi*, Vol. 32, No. 2, 2014, hlm. 139.

<sup>85</sup> Lauranje Smith, “*Archaeological Theory And The Politics Of Cultural Heritage*”, (London and New York : Roudledge Taylor& Francis Group, 2004), hlm. 1.

<sup>86</sup> Daud Aris Tanudirdjo, 2003, *loc.cit.*

<sup>87</sup> UU CB 11/2010 Pasal 23,29 dan 33.

<sup>88</sup> Hung Ming Tu, 2020: 3.

arkeologis yang melekat pada Kompleks Situs Candi Pulau Sawah diasumsikan sebagai faktor keterlibatan *stakeholder* lokal dalam pengelolaannya.

Sesuai ketentuan dan beberapa pendapat yang dikemukakan tadi, penelitian ini mengutip Pearson dan Sullivan (1995) yang menyimpulkan tujuan pelestarian demi mempertahankan nilai penting yang melekat pada objek warisan budaya.<sup>89</sup> realitasnya, esensi dari Kompleks Situs Candi Pulau Sawah dalam masa 1990-2022 terpelihara berkat peran serta *stakeholder* lokal di Kabupaten Dharmasraya yang terlibat dalam pengelolaan Pulau Sawah sebagai Pusaka Budaya.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa CRM penting karena mempertemukan para arkeolog dengan kelompok kepentingan yang memandang sumberdaya budaya sebagai warisan. Praktik CRM berdaya guna mengklarifikasi dan menengahi tuntutan dan klaim yang dibuat tentang masa lalu oleh berbagai kepentingan. CRM hadir guna mendefinisikan kepentingan dan populasi yang terkait kesalahan persepsi tentang masa lalu.<sup>90</sup>

Menurut Pearson and Sullivan (1995), Kerr (1996) dan King (1998) konflik atas warisan budaya kapan dan dimana dapat terjadi.<sup>91</sup> Menurut Prasadjo (2000:153), selama ini pemerintah memonopoli pengelolaan sumberdaya budaya di tanah air baik dalam hal kebijakan dan pendanaan maupun pemanfaatannya. Di samping itu otoritas arkeolog atas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya

---

<sup>89</sup> Daud Aris Tanudirdjo, 2004, *op.cit.*, hlm. 1.

<sup>90</sup> Luranje Smith, 2004, *op.cit.*, hlm. 2

<sup>91</sup> Luranje Smith, & Clarke, A. "Significance concepts in Australia management Archaeology", *Tempus-ST Lucia Queensland*-, 5, 67-78, 2004, hlm. 3.



arkeologi memicu hadirnya pendekatan Manajemen Sumberdaya Budaya (CRM) dengan penekanan pendekatan historis relatif, partikularistik dan multivokal.<sup>92</sup>

Menurut Soemijati (2006), CRM sebagai pendekatan mencakup tiga tahapan, yaitu perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan.<sup>93</sup> Sesuai UU CB 11/2010 Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.<sup>94</sup> Pada kegiatan pemugaran perlu diperhatikan keaslian bahan, bentuk, tata letak dan teknik pengerjaan.<sup>95</sup> Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya. Pemanfaatan Cagar Budaya dapat untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.<sup>96</sup>

Pada studi Pulau Sawah, tantangan pengelolaan terkait status lahan yang dikuasai Pewaris Kerajaan Siguntur<sup>97</sup> dapat diminimalisir dengan penerapan konsep *Cultural Resource Management* yang menerapkan paradigma yang disertai prinsip manajemen konflik<sup>98</sup> dan mengutamakan pengelolaan sumber daya budaya untuk masyarakat. Fakta konkret yang dapat disorot, bisa dicontohkan dari praktik

---

<sup>92</sup> Menurut Renfrew and Bahn, 1991; Hodder 1995 dalam Prasodjo, 2000:153, yang dikemukakan Kristantina Indriastuti, 2009, *op.cit.*, hlm. 23.

<sup>93</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>94</sup> PT. Synpra Engineering Consultant, “*Laporan Akhir Kajian Rencana Induk Pelestarian Situs Candi Pulau Sawah Kabupaten Dharmasraya*”, (Batusangkar : BPCB, 2019), hlm. 46

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> *Wawancara Tertulis* dengan Marsis Sutopo, 1 April 2024; *Wawancara* dengan Yusradi, 4 Juli 2024 di Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.

<sup>98</sup> Daud Aris Tanudirdjo, 2003, *op.cit.* hlm. 7.

pelestarian SPSP Batusangkar (kini BPK III) bersama *stakeholder* lain yang menerapkan pola kerja kemitraan dengan bekerja untuk masyarakat. Pimpinan pertama instansi itu (Surya Helmi) menekankan sikap merangkul masyarakat tempatan dengan membangun citra kolaborasi yang baik dan jangan pernah menggurui.<sup>99</sup> Sikap demikian merupakan salah satu penentu keberlangsungan pengelolaan Pulau Sawah.

Pelestarian Kompleks Situs Candi Pulau Sawah yang memiliki tantangan tidak menghentikan langkah *stakeholder* lokal untuk terus mengupayakan pengembangan Pulau Sawah dengan melakukan kolaborasi intensif sesuai tata kelola pemerintah.<sup>100</sup> *Stakeholder* lokal sebagai pengelola warisan budaya harus mengabdikan pada kepentingan masyarakat karena *Cultural Resource Management* mengedepankan warisan budaya sebagai milik bersama.<sup>101</sup> Pendekatan CRM menekankan keterlibatan masyarakat dimulai dari awal perencanaan studi kelayakan sampai pelaksanaan dan pengawasan.<sup>102</sup> Dalam hal ini CRM hadir guna mengendalikan aktivitas pelestarian dengan mengedepankan hak dan kepentingan masyarakat terhadap tinggalan leluhurnya.<sup>103</sup>

---

<sup>99</sup> Wawancara via telepon dengan Surya Helmi, 11 Juni 2024.

<sup>100</sup> Luranje Smith, & Clarke, A, 2004, *loc.cit.*

<sup>101</sup> Bambang, Sulistyanto, "Manajemen Pengelolaan Warisan Budaya : Evaluasi Hasil Penelitian Pusat Arkeologi Nasional (2005-2014)", *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi*, Vol. 32, No. 2, 2014, hlm. 141.

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> Di sini CRM bekerja dengan *mindset* sumberdaya arkeologi bersifat terbatas (tak bisa diperbaharui) dan bersifat kontekstual. Hal itu menimbulkan kebutuhan untuk melestarikan (*to conserve*) dan mengelola (*to manage*) sumberdaya tersebut supaya dapat dimanfaatkan untuk sejarah, ilmu pengetahuan dan menjamin kepentingan masyarakat, Daud Aris Tanudirdjo, Paradigma Arkeologi Publik Dan Undang-Undang Cagar Budaya 2010, *KRITIS*, 2022, hlm. 52.

CRM sebagai bagian dari proses pengelolaan warisan budaya diinformasikan oleh kebijakan publik dan undang-undang warisan, yang mengelola dan melindungi warisan budaya pribumi. Aplikasi dari paradigma CRM tidak hanya bersifat membangun, tapi juga mendefinisikan relasi antara arkeolog, kepentingan pribumi, dan pemerintah masyarakat adat, dan pemerintah. Terpeliharanya hubungan yang terwujud lewat kerja sama mengindikasikan CRM sebagai salah satu solusi menyelesaikan dan mengurangi konflik atas disposisi dan interpretasi budaya material Masyarakat Adat,<sup>104</sup> khususnya dalam studi ini terkait masyarakat adat di Kanagarian Siguntur.

Peran masyarakat dalam memberikan pemaknaan pada warisan budaya ialah terlibat dalam kegiatan pelestarian dan pengambilan keputusan dari pemanfaatannya. Hakikatnya semua pihak berperan aktif dan mendapat pemanfaatan dari pelestarian warisan budaya.<sup>105</sup> Di Siguntur, masyarakat dilibatkan peran sertanya dalam kegiatan pelestarian Pulau Sawah. Mayer-Oakes berpendapat bahwa pengelola sumber daya budaya harus sadar bahwa sumber daya budaya adalah milik masyarakat luas yang memiliki beragam kepentingan. Dalam konsep ini pengelola sumber daya budaya harus menempatkan diri sebagai *steward* (penjaga-pengelola) bukan sebagai *controller* (pengendali).<sup>106</sup>

Praktik Pelestarian Pulau Sawah dalam masa 1990 hingga 2022 telah merefleksikan kolaborasi intens antar *stakeholder* dengan merealisasikan Pasal 95

---

<sup>104</sup> Laurantje Smith, 2004, *op.cit*, hlm. 9.

<sup>105</sup> Daud Aris Tanudirdjo, 2003, *op.cit.*, hlm. 13

<sup>106</sup> Daud Aris Tanudirdjo, 2003, *op.cit.*, hlm. 9

UU CB 11/2010<sup>107</sup> dan Pasal 99 Ayat 1 & 2 UU CB 11/2010<sup>108</sup> sehingga upaya dinamis untuk melestarikan fisik dan nilai dari Pulau Sawah dapat terpenuhi dan tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.<sup>109</sup> Aksi itu sejalan dengan sasaran Manajemen Sumberdaya Budaya Berkesinambungan, yaitu mewujudkan tercapainya program pengelolaan yang terlaksana dengan baik melalui tahapan dari perencanaan, pengorganisasian dan mengaktualisasikan kegiatan sampai pada tahap monitoring sehingga tujuan menjadi lebih baik kelestariannya maupun memberi manfaatnya.<sup>110</sup>

Realitas itu dapat dikaitkan pula dengan Teory Grindle tentang *content of policy* pada *poin Type of Benefit*.<sup>111</sup> Pengembangan dan pemeliharaan Pulau Sawah membuat masyarakat Siguntur bangga<sup>112</sup> dan mencapai kesejahteraan rakyat karena mendapat pekerjaan sebagai tenaga lokal.<sup>113</sup> Hal itu menunjukkan implementasi *Cultural Resource Management* berdampak perkembangan sosial dan perkembangan ekonomi di berbagai bagian negara<sup>114</sup>, salah satunya di Siguntur.

---

<sup>107</sup> Menetapkan wewenang instansi pusat dan daerah.

<sup>108</sup> Melibatkan masyarakat pada kegiatan pelestarian.

<sup>109</sup> Upaya Pelindungan dengan cara penyelamatan untuk menanggulangi kerusakan, kehancuran dan kemusnahan. Upaya pengamanan untuk mencegah ancaman dan gangguan. Upaya Zonasi guna menentukan batas sesuai kebutuhan. Upaya Pemeliharaan untuk merawat kondisi fisik supaya lestari. Aksi Pemugaran guna mengembalikan kondisi fisik sesuai keaslian bahan, tata letak dan teknik pengerjaan, Termaktub dalam salinan UU CB 11/2010, Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 22-29, hlm. 9-10.

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> Hal yang menjadi penting dari proses implementasi ialah kebijakan yang dirancang mampu berdampak besar terhadap hasil implementasi. Dalam hal ini kebijakan amat memengaruhi implementasinya dan program yang manfaatnya dapat langsung dirasa oleh penerima manfaatnya akan mendapat partisipasi yang cukup besar dari penerima manfaat tersebut, Merilee S. Grindle, *Politic and Policy Implementation in the Third World*, (New Jersey : Princeton Legacy Library, 2017), hlm. 8-9.

<sup>112</sup> Wawancara dengan Tuan Acik Putri Marhasnida, 19 April 2024 di Siguntur

<sup>113</sup> Wawancara dengan Khulifni, 20 Juni 2024 di Siguntur.

<sup>114</sup> Bjorn Magnusson Staaf, "The rise and decline (?) of the modern in Sweden:



Kenyataan tersebut bisa juga dikaitkan dengan Teory Grindle pada *indicator interest affected*<sup>115</sup> (pihak yang kepentingannya mempengaruhi kebijakan), maka Pengelolaan situs-situs di Pulau Sawah yang mengaplikasikan paradigma *Cultural Resource Management (CRM)* berdampak positif bagi *stakeholder* lokal yang masing-masing memiliki porsi untuk mewujudkan kelestarian Pulau Sawah sebagai aset budaya bangsa.<sup>116</sup>

Penerapan CRM dan SHM dalam pengelolaan Pulau Sawah sukses menciptakan kemitraan sehingga kapabel menghindari dari konflik kepentingan antara daerah dan pusat sehingga penanganan cagar budaya dapat berjalan sinergis.<sup>117</sup> Kompleks Situs Candi Pulau Sawah yang terpelihara hingga kini dan dapat diadopsi nilai pentingnya berkat kerja sama *stakeholder* yang mapan menjalankan peranan. Aksi kolaborasi merupakan solusi mengurangi konflik atas disposisi dan interpretasi kebudayaan material<sup>118</sup> Inti dari pengelolaan situs candi di Pulau Sawah adalah mensosialisasikan nilai cagar budaya tersebut sekaligus membangun relasi supaya khalayak paham bahwa pelestarian tidak hanya memberi

---

reflected through cultural resource management archaeology”, *Current Swedish Archaeology*, hlm. 181.

<sup>115</sup> Dalam perumusan kebijakan terdapat aktor yang mempengaruhi perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Pada lembaga birokrasi terdapat kapasitas untuk mengelola program secara sukses dikarenakan memiliki lebih banyak tenaga ahli yang aktif sehingga memberi dampak penting terhadap implementasi. Merilee S. Grindle, 2017, *op.cit.*, hlm. 10.

<sup>116</sup> Mendekati pendapat Grindle, maka diperkirakan unsur-unsur (aktor-aktor) tersebut memiliki kepentingan tertentu dalam program sehingga berusaha melakukan pencapaian. Dalam hal ini semuanya berinteraksi dalam konteks kelembagaan tertentu, *ibid.*, hlm. 11-12.

<sup>117</sup> Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat, 2019, *op.cit.*, hlm. 8.

<sup>118</sup> *Ibid*, hlm. 8.

manfaat pada objek yang dilestarikan, tapi juga bagi masyarakat baik secara sosial, agama, ekonomi dan sebagainya.

Pemaparan teori maupun konsep yang disebutkan tadi guna membatasi fokus penelitian pada pengelolaan<sup>119</sup> Kompleks Situs Pulau Sawah yang memadukan kolaborasi antar *stakeholder*.

### 1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sarana untuk mencapai tuntutan yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah. Penelitian ini menerapkan metode sejarah dengan empat tahapan kerja, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.<sup>120</sup>

Tahap kegiatan heuristik adalah tahapan menemukan dan menghimpun sumber, informasi, jejak masa lampau.<sup>121</sup> Penelitian ini menghimpun sumber primer dan sumber sekunder yang diperoleh dari studi kearsipan, studi pustaka dan studi lapangan sehingga mendapatkan beberapa sumber seperti foto, peta, dokumen dan hasil wawancara dari beberapa informan seperti Surya Helmi (Kepala SPSP Batusangkar yang berperan sebagai penanggung jawab kegiatan Ekskavasi Penyelamatan Situs Pulau Sawah periode 1990-2000), Marsis Sutopo (Kepala BP3 2002-2007 dan arkeolog yang sejak awal tahun 1990-an terlibat sebagai koordinator dan pelaksana Ekskavasi Penyelamatan Situs Pulau Sawah) dan lain-lain yang informasinya menyokong pembahasan dalam penelitian.

---

<sup>119</sup> Perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan

<sup>120</sup> Nina Herlina, *Metode Sejarah*, (Bandung, Satiya Historika, 2008), hlm. 17.

<sup>121</sup> *Ibid*, hlm. 15.

Tahapan kritik, yaitu kegiatan menyeleksi sumber-sumber sejarah secara kritis.<sup>122</sup> Kritik dalam metode sejarah terdiri atas kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern untuk menyelidiki otentisitas sumber sedangkan kritik intern merupakan proses penyeleksian data dengan menyelidiki kredibilitas sumber. Hasil dari kritik sumber merupakan produk intelektual sejarawan (penulis) berdasarkan temuan-temuannya di lapangan.<sup>123</sup>

Tahap interpretasi adalah kegiatan menafsirkan fakta-fakta serta menetapkan makna dan saling hubungan daripada fakta-fakta yang diperoleh.<sup>124</sup> Tahapan yang rentan terhadap subjektivitas<sup>125</sup> ini merupakan proses pemberian nilai atau makna terhadap data yang telah diperoleh. Apabila seorang sejarawan salah menafsirkan suatu data maka pengolahan hasil penulisan tidak akan mendapatkan hasil seperti yang diinginkan. Oleh sebab itu dalam tahap ini peneliti amat berhati-hati supaya tidak keliru mengartikan peristiwa.

Tahapan terakhir dari langkah-langkah metode sejarah ini adalah tahapan historiografi atau penulisan sejarah.<sup>126</sup> Tahapan historiografi, yaitu tahapan atau kegiatan menyampaikan peristiwa lampau sesuai dengan jejak-jejaknya.<sup>127</sup> Tahap ini menghasilkan tesis yang berjudul “*Pelestarian Kompleks Situs Candi Pulau Sawah Dan Peran Serta Stakeholder Lokal Di Kabupaten Dharmasraya (1990-2022)*”.

---

<sup>122</sup> *Ibid.*

<sup>123</sup> Linda Sunarti, “*Metode Penelitian Sejarah*”, (Jakarta, Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2020), hlm. 1.

<sup>124</sup> Herlina, *loc.cit.*

<sup>125</sup> Kuntowijoyo, “*Pengantar Ilmu Sejarah*”, (Bentang: Yogyakarta, 2001), hlm. 102.

<sup>126</sup> *Ibid*, hlm.105.

<sup>127</sup> Herlina, *op.cit*, hlm. 6.

## 1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan agar penelitian ini bersifat sistematis dan menunjukkan urutan-urutan pemikiran secara logis. Sistematika yang dimaksud untuk menegaskan dan memperjelas kronologis dari karya yang dihasilkan agar tersusun baik alur waktu, maupun alur peristiwa.

Penulisan tesis ini dibagi dalam lima bab. **Bab pertama** merupakan **bab pendahuluan** yang terdiri dari latar belakang Masalah, Perumusan masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan pustaka, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**Bab kedua** mengkaji Sejarah dan Penemuan Kompleks Situs Candi Pulau Sawah. Bab ini terdiri atas tiga subbab, **pertama** menguraikan Kondisi Lingkungan, **kedua** Menjajaki Sejarah Situs, **ketiga** menjelaskan Penemuan Situs.

**Bab ketiga** mengkaji tentang Pengelolaan Terpadu Dalam Masa 1990-2022. Bab tersebut terdiri atas tiga subbab, **pertama** Akar Dari Praktik Pengelolaan Warrisan Budaya, **kedua** Pengelolaan Dalam Masa 1990-2022 dengan pembahasan Penyelamatan dan Pengamanan 11 Munggu; Dua Munggu Cikal Bakal Candi I dan Candi II (1990-2002), **Perlindungan Lewat Pemugaran & Pemeliharaan** (2003-2011) dan **Upaya Pengembangan dan Pemanfaatan** (2012-2022). Kemudian, **ketiga** Dari Temuan Menjadi Identitas.

**Bab keempat** membahas Peran Serta *Stakeholder* Lokal Dan Citra Kolaborasi. Bab ini terdiri atas dua subbab, **pertama** Membahas Para *Stakeholder* yang terdiri atas SPSP Batusangkar (Kini BPK III), Balar Medan, Puslit Arkenas, Pemkab Dharmasraya, Perangkat Nagari, Pewaris Kerajaan Siguntur, Masyarakat



Lokal dan Pihak Swasta, **kedua** mengenai Citra Kolaborasi yang mendeskripsikan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan, Munculnya *Cultural Awareness dan Relasi Antar Stakeholder*.

Penelitian ini ditutup oleh **bab kelima** berupa kesimpulan yang mengungkap peran serta *stakeholder* lokal dalam Pelestarian Kompleks Situs Candi Pulau Sawah. Adapun uraian argumen pada kesimpulan merupakan hasil analisis akhir dari interpretasi yang berusaha menjawab isu pokok pada rumusan masalah. Tulisan ini dilengkapi dengan daftar sumber, lampiran dan sebagainya.

